

**ADMINISTRASI PENDIDIKAN DALAM Mendukung STANDAR PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI ERA KURIKULUM MERDEKA: STUDI  
LITERATUR PADA KONTEKS SEKOLAH DASAR**

**Esmi Tsalsa Sofiawati**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Mutiara

[tsalsaesmi@gmail.com](mailto:tsalsaesmi@gmail.com)

**Nurul Zahra Azizah**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Mutiara

[nurulzahrazizah@gmail.com](mailto:nurulzahrazizah@gmail.com)

**Siti Mariam Ramadanti**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Mutiara

[smaryamr311@gmail.com](mailto:smaryamr311@gmail.com)

**Abstrak**

Kurikulum Merdeka menuntut adanya transformasi pendidikan yang tidak hanya menasar aspek pedagogis, tetapi juga memperkuat peran administratif dalam mendukung standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi pendidikan dalam mendukung implementasi standar PTK di era Kurikulum Merdeka pada tingkat sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa administrasi pendidikan berperan penting dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sekolah yang terkait dengan manajemen PTK. Administrasi yang terstruktur dan adaptif terbukti mampu mendorong profesionalisme guru, efektivitas program pengembangan kompetensi, serta penguatan evaluasi kinerja berbasis data. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM administratif, beban kerja guru, dan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan dalam implementasi optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi pendidikan menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Administrai Pendidikan, Standar PTK, Kurikulum Merdeka, Sekolah Dasar

**Abstract**

The Merdeka Curriculum demands an educational transformation that not only focuses on pedagogical aspects but also reinforces the administrative role in supporting teacher and education personnel (PTK) standards. This study aims to analyze the role of educational administration in supporting the implementation of PTK standards in the era of the Merdeka Curriculum at the elementary school level. This research employs a literature review method by examining various relevant sources such as journals, books, and policy

documents. The results indicate that educational administration plays a critical role in the planning, organizing, implementation, and supervision of school activities related to PTK management. A structured and adaptive administrative system effectively promotes teacher professionalism, supports competency development programs, and strengthens performance evaluation based on data. However, challenges such as limited administrative human resources, excessive teacher workload, and technological infrastructure constraints continue to hinder optimal implementation. Therefore, strengthening the educational administration system is essential for ensuring the successful and sustainable implementation of the Merdeka Curriculum.

**Keywords:** educational administration, PTK standards, Merdeka Curriculum, elementary school

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan inovasi kurikulum, salah satunya adalah Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk di tingkat sekolah dasar (SD). Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, dengan menekankan pembelajaran terdiferensiasi, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, serta struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini<sup>1</sup>.

Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut perubahan dalam sistem manajemen pendidikan, terutama dalam aspek administrasi dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (PTK). Administrasi pendidikan yang responsif, terorganisasi dengan baik, dan mampu mengelola berbagai perubahan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, penguatan kompetensi guru dalam pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sangat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Namun, pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, serta dinamika kebijakan yang cepat dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengelolaan administrasi yang baik dan pengembangan kompetensi pendidik yang berkelanjutan agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana administrasi pendidikan dalam mendukung standar pendidik dan tenaga

---

<sup>1</sup> Neliwati, "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah," *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP* 4, no. 2 (August 5, 2023), <https://doi.org/10.30596/jppp.v4i2.15475>.

kependidikan (PTK) di era Kurikulum Merdeka. Untuk itu, peneliti menganalisis berbagai referensi yang membahas hubungan antara standar PTK, praktik administrasi, dan kebijakan kurikulum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu penelaahan sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan. Kajian literatur, sebagaimana dijelaskan Creswell<sup>2</sup>, merupakan ringkasan terorganisir dari berbagai referensi yang menggambarkan teori dan informasi terkait topik yang diteliti.

Data dikumpulkan melalui kegiatan membaca dan mencatat isi referensi yang sesuai, lalu diolah secara sistematis untuk menyusun landasan teori dan kerangka konseptual. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan temuan dari literatur dan memberikan penjelasan yang mendalam, bukan sekadar menguraikan isi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Administrasi Pendidikan di Sekolah Dasar**

Administrasi pendidikan di sekolah dasar merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengatur serta mengelola seluruh unsur dalam proses pendidikan. Proses ini mencakup empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang semuanya diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional secara efektif, efisien, dan berdaya guna.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, administrasi pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademik seperti pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan staf administrasi. Selain itu, administrasi pendidikan juga mencakup pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, manajemen keuangan, serta penataan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan anak.

Di tingkat sekolah dasar, administrasi pendidikan memegang peranan krusial karena jenjang ini merupakan fondasi awal pembentukan karakter, pengetahuan dasar, serta keterampilan sosial anak. Oleh sebab itu, pengelolaan yang baik dan profesional dalam semua aspek administrasi pendidikan akan sangat menentukan mutu layanan pendidikan yang diterima siswa. Dengan administrasi yang efektif, sekolah dasar dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

---

<sup>2</sup> Bakhrudin All Habsy, "Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur," *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (September 16, 2017): 90, <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>.

<sup>3</sup> Fatkhur Rohman Jamil, Akhmad Ramli, and Sudadi Sudadi, "KONSEP DASAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUPNYA," *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 5, no. 1 (May 30, 2023): 53, <https://doi.org/10.56630/jti.v5i1.360>.

Fungsi administrasi pendidikan di sekolah dasar mencakup empat pilar utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan pendidikan<sup>4</sup>. Pertama adalah fungsi perencanaan, yaitu proses merancang berbagai program sekolah secara matang. Di dalamnya termasuk penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan anggaran, serta penetapan kebijakan yang berpijak pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Perencanaan yang baik menjadi arah dan fondasi bagi semua kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Kedua, fungsi pengorganisasian, yang berperan dalam menyusun struktur organisasi sekolah secara jelas dan efektif. Ini mencakup penempatan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi mereka, serta pembentukan tim kerja yang mampu berkolaborasi dengan baik. Fungsi ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang teratur, saling mendukung, dan mampu menjalankan program pendidikan secara sinergis.

Ketiga adalah fungsi pelaksanaan, yaitu menggerakkan semua rencana yang telah disusun agar berjalan dalam praktik. Fungsi ini mencakup pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi hasil belajar, serta pelaksanaan kebijakan sekolah dengan pendekatan yang terarah dan sistematis. Di tahap ini, seluruh komponen sekolah bergerak bersama untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.

Terakhir, fungsi pengawasan menjadi unsur penting yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan visi, tujuan, dan standar yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, bukan semata-mata untuk menilai, tetapi juga untuk memberikan umpan balik dan perbaikan demi peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Dengan menjalankan keempat fungsi ini secara konsisten dan penuh tanggung jawab, administrasi pendidikan di sekolah dasar menjadi alat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, inklusif, dan mendukung pertumbuhan optimal anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Ruang lingkup administrasi pendidikan di sekolah dasar mencakup berbagai aspek penting yang saling berkaitan dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang tertata dan berkualitas. Salah satu unsur paling krusial adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM)<sup>5</sup>. Dalam konteks ini, administrasi pendidikan berperan dalam seluruh siklus manajemen SDM, mulai dari proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan, penempatan sesuai kompetensi dan kebutuhan

---

<sup>4</sup> Annisa Rahmadani, Rizka Rahman Tanjung, and Windi Melisa, "Konsep Administrasi Pendidikan," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (June 28, 2024): 79–86, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2848>.

<sup>5</sup> Hasbi Hasidik et al., "Ruang Lingkup Dan Fungsi Administrasi Pendidikan Era Society 5.0: Kajian Komprehensif Dalam Perspektif Islam," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 4 (October 28, 2024): 71–86, <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3270>.

sekolah, hingga pembinaan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. SDM yang dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan utama dalam menjamin mutu pembelajaran.

Secara keseluruhan, ruang lingkup administrasi pendidikan di sekolah dasar sangat luas dan kompleks. Namun, ketika dikelola dengan baik, seluruh elemen ini bersatu membentuk ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari segi sosial, emosional, dan moral. Administrasi pendidikan yang kuat adalah pondasi bagi sekolah dasar yang efektif, humanis, dan berpihak pada anak.

Manajemen sumber daya manusia (SDM) pendidikan di sekolah dasar merupakan salah satu pilar strategis dalam sistem administrasi pendidikan yang berperan besar dalam menjamin keberlangsungan dan mutu layanan pembelajaran<sup>6</sup>. Fokus utama dari manajemen ini adalah bagaimana mengelola guru dan tenaga kependidikan secara profesional, agar mereka mampu menjalankan tugas dengan optimal, penuh dedikasi, dan produktivitas tinggi.

Langkah pertama dalam manajemen SDM yang efektif adalah melakukan perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan secara cermat, berdasarkan rasio ideal, jumlah siswa, serta jenis layanan pendidikan yang diberikan. Perencanaan ini menjadi dasar penting dalam menentukan berapa dan siapa yang dibutuhkan sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar secara maksimal.

Setelah perencanaan, proses rekrutmen dan seleksi menjadi tahap krusial berikutnya. Melalui mekanisme seleksi yang ketat dan objektif, sekolah dapat memastikan bahwa calon guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi, integritas, serta motivasi yang sesuai dengan nilai dan visi pendidikan dasar. Rekrutmen yang berkualitas akan menentukan kualitas pembelajaran dalam jangka panjang.

Tidak berhenti di situ, pembinaan dan pelatihan berkelanjutan menjadi komitmen penting untuk mendukung pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini bisa berupa workshop, pelatihan internal, kemitraan dengan lembaga pelatihan, hingga komunitas belajar guru yang mendorong refleksi dan inovasi dalam mengajar. Selain pengembangan, penilaian kinerja secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil penilaian ini dapat menjadi dasar dalam memberikan penghargaan atas kinerja unggul, sekaligus sanksi pembinaan bagi yang perlu perbaikan. Dengan demikian, sekolah membangun budaya kerja yang adil, akuntabel, dan memotivasi.

Tak kalah penting adalah pengelolaan beban kerja yang proporsional, agar guru tidak terbebani secara berlebihan dan tetap dapat memberikan perhatian maksimal kepada setiap siswa.

---

<sup>6</sup> Rokhmaniyah Rokhmaniyah, "MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENCAPAI PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI SEKOLAH DASAR," *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 1, no. 1 (July 1, 2017), <https://doi.org/10.20961/jdc.v1i1.14410>.

Di sisi lain, motivasi kerja juga harus senantiasa dijaga, baik melalui suasana kerja yang mendukung, pengakuan atas prestasi, maupun dukungan dari pimpinan sekolah dan rekan kerja. Dengan manajemen SDM yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengembangan potensi, sekolah dasar akan mampu membangun tim pendidik yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berjiwa pendidik sejati yang hadir sepenuh hati dalam proses tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Dengan demikian, administrasi pendidikan di sekolah dasar memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar mengatur aktivitas harian atau operasional sekolah. Ia berfungsi sebagai sistem manajerial yang strategis, yang secara langsung berkontribusi terhadap pembentukan sumber daya manusia pendidikan yang profesional, adaptif, dan visioner. Dalam konteks pendidikan modern yang terus berkembang, peran ini menjadi semakin penting, terutama dalam menjawab berbagai tantangan baru yang muncul seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan peserta didik masa kini.

Salah satu tantangan nyata adalah implementasi Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada fleksibilitas, personalisasi pembelajaran, serta ruang untuk inovasi baik dari guru maupun siswa. Untuk menjawab tuntutan tersebut, sekolah dasar memerlukan sistem administrasi yang responsif, terorganisasi, dan mampu mengelola berbagai perubahan dengan bijak. Administrasi pendidikan tidak hanya mengatur struktur dan alur kerja, tetapi juga menjadi penggerak budaya sekolah yang kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Lebih jauh, penguatan administrasi pendidikan bukan hanya kebutuhan internal sekolah, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya besar dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional secara menyeluruh. Ketika administrasi berjalan efektif dengan perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang efisien, pengawasan yang objektif, dan evaluasi yang berkelanjutan maka setiap komponen dalam ekosistem pendidikan sekolah dasar akan bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama.

Dalam kerangka ini, administrasi pendidikan menjadi jembatan antara visi pendidikan nasional dengan praktik nyata di lapangan. Ia menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa setiap anak tidak hanya memperoleh akses pendidikan, tetapi juga pengalaman belajar yang berkualitas, bermakna, dan relevan dengan kehidupan mereka di masa depan.

### **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)**

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) merupakan seperangkat kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan guna memastikan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai rujukan utama dalam proses seleksi, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kinerja PTK agar mereka dapat menjalankan peran secara profesional, efektif, dan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan nasional.

Secara umum, standar PTK mencakup beberapa aspek kunci, yaitu:

1. Kualifikasi akademik yang menjadi persyaratan pendidikan formal minimal. Guru diwajibkan memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, sedangkan tenaga kependidikan minimal harus memiliki pendidikan setingkat Diploma III (D-III) yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kualifikasi ini menjadi dasar legitimasi profesionalisme serta kompetensi dasar yang harus dimiliki sejak awal<sup>7</sup>.
2. Kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh pendidik mencakup empat aspek<sup>8</sup>:
  - a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif serta memahami karakteristik peserta didik.
  - b. Kompetensi kepribadian, berupa integritas moral, sikap profesional, dan karakter kuat yang mencerminkan etika sebagai seorang pendidik.
  - c. Kompetensi sosial, yang berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara positif dengan siswa, kolega, dan masyarakat.
  - d. Kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan aplikatif.
3. Proses rekrutmen PTK dilakukan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar satuan pendidikan mendapatkan tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan dan sejalan dengan standar nasional pendidikan. Proses seleksi ini juga menjadi instrumen kontrol mutu dalam pengadaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
4. Pembinaan dan pengembangan profesional berkelanjutan menjadi elemen penting dalam peningkatan mutu PTK. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan, workshop, dan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang bertujuan meningkatkan kompetensi serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika dunia pendidikan dan kemajuan teknologi.
5. Evaluasi kinerja PTK dilaksanakan secara periodik untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai standar yang berlaku. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan pengembangan karir, pemberian penghargaan, maupun pelaksanaan tindakan perbaikan apabila diperlukan.
6. Sertifikasi guru merupakan bukti formal atas pengakuan kompetensi profesional yang diakui secara nasional. Sertifikasi ini diperoleh melalui program PPG yang dilaksanakan oleh institusi resmi dan menunjukkan bahwa seorang guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>7</sup> Nur Kholisah et al., "Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar," n.d.

<sup>8</sup> Reizahra Diannisa, Nini Ariani, and Tuti Abdriani, "STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN," n.d.

7. Kesehatan jasmani dan rohani juga menjadi bagian penting dari standar PTK. Kondisi fisik dan mental yang prima diperlukan agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjalankan peran secara optimal serta menjadi teladan yang baik bagi peserta didik<sup>9</sup>.

Secara keseluruhan, penerapan standar PTK sangat esensial dalam membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, kompeten, serta berintegritas tinggi. Standar ini mendukung pencapaian tujuan utama pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik secara utuh.

### **Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Merdeka merupakan bentuk pembaruan dalam sistem pembelajaran yang bertujuan memberikan kebebasan dan keluwesan lebih besar kepada guru serta peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih bermakna dan efektif. Terdapat tiga ciri utama Kurikulum Merdeka yang menjadi pembeda signifikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu: pembelajaran yang terdiferensiasi, penerapan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta struktur kurikulum yang fleksibel<sup>10</sup>.

Pertama, pendekatan pembelajaran terdiferensiasi memberikan peluang bagi guru untuk menyesuaikan proses belajar dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik<sup>11</sup>. Guru memiliki keleluasaan dalam memilih strategi mengajar sesuai dengan kondisi lokal dan karakter siswa, misalnya dengan menggunakan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau pendekatan interaktif lainnya. Model ini memungkinkan pengalaman belajar menjadi lebih relevan dan personal, sehingga mendorong peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan gaya belajar masing-masing.

Kedua, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi elemen khas dalam Kurikulum Merdeka. Proyek ini dirancang untuk menumbuhkan keterampilan sosial dan karakter mulia peserta didik. Melalui aktivitas lintas disiplin, siswa didorong untuk menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti gotong royong, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis dalam konteks kehidupan nyata. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya aspek akademik, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian yang sesuai dengan profil ideal pelajar Indonesia.

Ketiga, struktur kurikulum yang fleksibel memungkinkan fokus pada materi inti yang benar-benar esensial. Jumlah mata pelajaran dikurangi agar peserta didik memiliki lebih banyak waktu untuk mendalami materi, mengembangkan karakter, serta meningkatkan kompetensi dasar seperti

---

<sup>9</sup> Nur Khalimah, "SISTEM REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN" 2 (2024).

<sup>10</sup> Neliwati, "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah."

<sup>11</sup> Jamilatun Nafi'ah, Dukan Jauhari Faruq, and Siti Mutmainah, "KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI MADRASAH IBTIDAIYAH," n.d.

literasi dan numerasi. Capaian pembelajaran ditentukan berdasarkan fase (bukan per semester), sehingga guru dan sekolah dapat merancang waktu dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi nyata peserta didik. Fleksibilitas ini juga memberi ruang bagi guru untuk memilih bahan ajar dan metode yang paling relevan.

Karakteristik utama Kurikulum Merdeka sangat terkait dengan kompetensi guru<sup>12</sup>. Guru dituntut memiliki kecakapan pedagogis yang mumpuni untuk mengembangkan pembelajaran yang adaptif dan berbasis proyek. Mereka juga harus mampu mendorong pertumbuhan soft skills serta membentuk karakter peserta didik, di samping melakukan asesmen formatif yang menyeluruh agar pembelajaran berjalan sesuai kebutuhan siswa. Kondisi ini menuntut guru untuk terus mengembangkan kapasitas profesional dan bersikap adaptif terhadap dinamika pendidikan.

Di sisi lain, tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi pembelajaran, pengelolaan data capaian siswa, serta pelaksanaan proyek P5. Mereka turut memastikan terselenggaranya lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung inovasi pembelajaran sesuai prinsip Kurikulum Merdeka. Dukungan sistematis dari tenaga kependidikan menjadikan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan staf sekolah menjadi landasan utama keberhasilan penerapan kurikulum ini.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka menghadirkan paradigma baru yang lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Kurikulum ini menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran serta membuka peluang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk berkreasi dan berkolaborasi demi menciptakan sistem pendidikan yang unggul dan selaras dengan tuntutan zaman.

### **Tantangan Administrasi Pendidikan di Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka**

Administrasi pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Namun, di lapangan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sekolah dasar. Tantangan ini mencakup aspek kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur administratif, serta dinamika kebijakan pendidikan yang terus berubah. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang menghambat optimalisasi peran administrasi pendidikan di tingkat sekolah dasar:

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Administratif yang Kompeten**

Banyak sekolah dasar, terutama yang berada di daerah terpencil dan tertinggal, mengalami kekurangan tenaga administrasi yang memiliki kompetensi dalam manajemen pendidikan. Tugas-

---

<sup>12</sup> Koni Olive Tunas and Richard Daniel Herdi Pangkey, "Kurikulum Merdeka: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dengan Kebebasan dan Fleksibilitas," *Journal on Education* 6, no. 4 (June 25, 2024): 22031–40, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6324>.

tugas administratif sering kali dialihkan kepada guru, kepala sekolah, atau staf yang tidak memiliki latar belakang administratif. Akibatnya, fokus mereka terhadap tugas utama dalam pembelajaran atau kepemimpinan pendidikan menjadi berkurang.

## 2. Beban Administratif Guru yang Berlebihan

Dalam praktiknya, guru di sekolah dasar tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar, tetapi juga dibebani dengan berbagai pekerjaan administratif, seperti entri data Dapodik, penyusunan laporan supervisi, dan pelaksanaan proyek P5<sup>13</sup>. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk merancang pembelajaran yang terdiferensiasi dan bermakna, sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka.

## 3. Minimnya Infrastruktur Teknologi dan Akses Digital

Implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada sistem digital, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan aplikasi manajemen pembelajaran. Namun, sejumlah sekolah dasar masih menghadapi kendala infrastruktur, termasuk keterbatasan perangkat komputer, koneksi internet yang tidak stabil, serta kurangnya pelatihan dalam penggunaan teknologi bagi PTK<sup>14</sup>.

## 4. Kurangnya Pelatihan Administratif bagi Kepala Sekolah dan Staf

Tantangan guru di zaman sekarang ini, menuntut guru senantiasa aktif mengembangkan potensinya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan administrasi pendidikan dan kompetensi guru yang menjadi jalan terbentuknya mutu pendidikan di sekolah<sup>15</sup>. Sebagian besar pelatihan yang diberikan untuk memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka lebih berfokus pada aspek pedagogis. Sementara itu, pelatihan mengenai manajemen administratif yang efektif, pengelolaan data, dan supervisi berbasis digital masih sangat minim. Padahal, keberhasilan transformasi kurikulum sangat bergantung pada kekuatan manajemen dan sistem administratif di sekolah.

## 5. Dinamisnya Kebijakan Tanpa Dukungan Dokumentasi yang Tertata

Perubahan kebijakan pendidikan yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan sistem administrasi yang fleksibel dan terdokumentasi dengan baik. Sekolah sering kali merasa kewalahan dalam menyesuaikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sesuai dengan kebijakan terbaru.

## 6. Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi Internal Sekolah

---

<sup>13</sup> Ribka Trifena Putri Gea et al., "ANALISIS KESULITAN GURU DALAM MENGERJAKAN BEBAN ADMINISTRASI KURIKULUM MERDEKA YANG TINGGI DALAM PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN PADA PEMBELAJARAN DI SD SWASTA ATTAUFIQ" 13, no. 6 (2025).

<sup>14</sup> Ade Wawan, "PERANADMINISTRASIPENDIDIKANDALAMMEWUJUDKANSEKOLAH EFEKTIFDANEFISIEN" 04, no. 03 (2025).

<sup>15</sup> Triyandi Syamsuri Siddiq, "STRATEGI PENERAPAN ADMINISTRASI KURIKULUM MERDEKA DI MTS MA SUKAWENING BANDUNG," n.d.

Koordinasi antar bagian di dalam sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi, masih belum optimal. Ketidakadaan sistem komunikasi internal yang jelas dan terdokumentasi menyebabkan pelaksanaan tugas sering berjalan secara terpisah, tidak sinergis, dan sulit untuk dievaluasi secara menyeluruh.

Dampak dari tantangan-tantangan tersebut adalah tidak optimalnya peran administrasi pendidikan sebagai pendukung transformasi pembelajaran. Hal ini berpotensi menghambat pengembangan profesional PTK, memperlambat adaptasi terhadap Kurikulum Merdeka, serta menurunkan kualitas layanan pendidikan dasar. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sistemik dan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas administrasi pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar.

### **Keterkaitan Administrasi Pendidikan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Era Kurikulum Merdeka**

#### 1. Administrasi Pendidikan sebagai Pengontrol dan Pendukung Kualitas PTK

Administrasi pendidikan berfungsi sebagai sistem yang mengelola seluruh aktivitas pendidikan secara terorganisir, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, administrasi tidak sekadar menjadi kegiatan birokratis, melainkan juga berperan sebagai pengendali mutu dan fasilitator strategis yang menjamin seluruh pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan, serta mendorong pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efektif dan transparan.

Administrasi pendidikan dalam kurikulum merdeka adalah segenap proses penataan personel di sekolah. Yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta dibina secara kontinu di sekolah, sehingga para pegawai dapat membantu atau menunjang kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan para personal harus dikelola dengan baik agar mereka senantiasa aktif dan bergairah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari<sup>16</sup>.

Dengan manajemen administratif yang baik, sekolah dapat mengelola PTK secara sistematis, memastikan guru tidak hanya menjalankan tugas mengajar, tetapi juga berkembang secara profesional sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka.

#### 2. Kontribusi Administrasi dalam Mewujudkan Standar PTK

##### a. Proses Rekrutmen yang Terstandar

Melalui sistem administrasi sekolah dan sistem nasional seperti Dapodik, proses rekrutmen PTK dapat diarahkan untuk:

---

<sup>16</sup> Shadrina Azzahra, Laila Nadya, and Naila Audiva Hutasuhut, "Implementasi Proses Administrasi Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka di SD IT Zia Salsabila," *TSAQOFAH* 4, no. 4 (June 26, 2024): 3300–3311, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i4.3256>.

- Memenuhi syarat akademik minimal, yaitu lulusan S1 atau D4<sup>17</sup>.
- Sesuai dengan kebutuhan riil satuan pendidikan, misalnya berdasarkan rasio guru dan siswa atau formasi mata pelajaran<sup>18</sup>.
- Tersinergi dengan kebijakan nasional, seperti CPNS atau PPPK, dan terhubung dengan data tenaga kependidikan secara nasional.

b. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

Administrasi pendidikan mendukung pengelolaan program peningkatan kompetensi, seperti:

- Pelatihan guru terkait implementasi Kurikulum Merdeka.
- Akses terhadap Platform Merdeka Mengajar (PMM).
- Pemantauan keikutsertaan dalam forum pengembangan seperti komunitas belajar atau pelatihan internal (IHT).
- Dengan pencatatan yang akurat, sekolah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan strategi pengembangan kompetensi guru secara lebih tepat.

c. Evaluasi dan Supervisi PTK

Fungsi administrasi mencakup:

- Pencatatan hasil supervisi oleh kepala sekolah<sup>19</sup>.
- Pengelolaan data Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan tenaga kependidikan.
- Dokumentasi refleksi guru dalam pelaksanaan pembelajaran serta kegiatan proyek P5.

Semua ini penting untuk menjaga transparansi kinerja dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

3. Manajemen PTK yang Adaptif dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka mengubah peran guru dari penyampai materi menjadi fasilitator yang harus mampu:

- Mendesain pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa.
- Mengelola proyek P5 yang bersifat lintas mata pelajaran.
- Menguasai penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar.

---

<sup>17</sup> Rismananda Chelsea, Ica Putri Nabila, and Syunu Trihantoyo, "Proses Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMPN 34 Surabaya," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (May 22, 2024): 231–39, <https://doi.org/10.31004/jpion.v3i2.265>.

<sup>18</sup> Khalimah, "SISTEM REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN."

<sup>19</sup> Erni Agustina Suwartini, "SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH, PROFESIONALISME GURU DAN MUTU PENDIDIKAN," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 14, no. 2 (November 23, 2017): 62–70, <https://doi.org/10.17509/jap.v24i2.8294>.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, sekolah memerlukan sistem manajemen PTK yang tanggap, reflektif, dan terus berkembang. Hanya sekolah dengan administrasi yang terstruktur dan berbasis digital yang mampu menyediakan:

- Informasi terkini mengenai kompetensi guru dan kebutuhan pelatihannya.
- Perencanaan pelatihan yang sistematis dan terpadu.
- Evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berkelanjutan.

#### 7. Pentingnya Sinergi yang Didukung Administrasi Efektif

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan<sup>20</sup>, yang ditunjang oleh:

- Alur komunikasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.
- Pembagian tugas berbasis data, melalui dokumen resmi seperti SK, jadwal supervisi, dan laporan kegiatan.
- Kolaborasi antar fungsi yang dikoordinasi oleh kepala sekolah dengan dukungan sistem administrasi yang rapi.

Tanpa administrasi yang efisien, proses koordinasi, evaluasi, hingga pengambilan keputusan akan terhambat, dan akhirnya berdampak pada kualitas penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah.

## **KESIMPULAN**

Administrasi pendidikan di sekolah dasar memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di era Kurikulum Merdeka. Melalui fungsi-fungsinya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, administrasi pendidikan bukan hanya menjadi instrumen birokratis, tetapi juga pengungkit utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Studi ini menunjukkan bahwa efektivitas administrasi pendidikan sangat menentukan keberhasilan manajemen SDM pendidikan, mulai dari rekrutmen, pengembangan profesional, hingga evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan kompetensi tenaga administrasi, beban administratif guru yang tinggi, dan kurangnya dukungan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat sistem administrasi pendidikan, termasuk peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah, pelatihan administrasi berbasis digital, dan integrasi kebijakan yang berpihak pada efisiensi kerja guru.

---

<sup>20</sup> Gea et al., "ANALISIS KESULITAN GURU DALAM MENGERJAKAN BEBAN ADMINISTRASI KURIKULUM MERDEKA YANG TINGGI DALAM PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN PADA PEMBELAJARAN DI SD SWASTA ATTAUFIQ."

## REFERENSI

- Annisa Rahmadani, Rizka Rahman Tanjung, and Windi Melisa. "Konsep Administrasi Pendidikan." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (June 28, 2024): 79–86. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2848>.
- Azzahra, Shadrina, Laila Nadya, and Naila Audiva Hutasuhut. "Implementasi Proses Administrasi Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka di SD IT Zia Salsabila." *TSAQOFAH* 4, no. 4 (June 26, 2024): 3300–3311. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i4.3256>.
- Chelsea, Rismananda, Ica Putri Nabila, and Syunu Trihantoyo. "Proses Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMPN 34 Surabaya." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (May 22, 2024): 231–39. <https://doi.org/10.31004/jpion.v3i2.265>.
- Diannisa, Reizahra, Nini Ariani, and Tuti Abdriani. "STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN," n.d.
- Gea, Ribka Trifena Putri, Godlin Hutauruk, Tria Yuliharni Damanik, and Yefta Sitanggang. "ANALISIS KESULITAN GURU DALAM MENGERJAKAN BEBAN ADMINISTRASI KURIKULUM MERDEKA YANG TINGGI DALAM PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN PADA PEMBELAJARAN DI SD SWASTA ATTAUFIQ" 13, no. 6 (2025).
- Habsy, Bakhrudin All. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur." *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (September 16, 2017): 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>.
- Hasbi Hasidik, Elsi Retriani, Ahmad Sabri, and Rully Hidayatullah. "Ruang Lingkup Dan Fungsi Administrasi Pendidikan Era Society 5.0: Kajian Komprehensif Dalam Perspektif Islam." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 4 (October 28, 2024): 71–86. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3270>.
- Jamil, Fatkhur Rohman, Akhmad Ramli, and Sudadi Sudadi. "KONSEP DASAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUPNYA." *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 5, no. 1 (May 30, 2023): 53. <https://doi.org/10.56630/jti.v5i1.360>.
- Khalimah, Nur. "SISTEM REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN" 2 (2024).
- Kholisah, Nur, Didi Iskandar, Dede Nurhasanah, Sopan Sofiyani, and Hayatul Masquroh. "Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar," n.d.
- Nafi'ah, Jamilatun, Dukan Jauhari Faruq, and Siti Mutmainah. "KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI MADRASAH IBTIDAIYAH," n.d.
- Neliwati. "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah." *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP* 4, no. 2 (August 5, 2023). <https://doi.org/10.30596/jppp.v4i2.15475>.
- Rokhmaniyah, Rokhmaniyah. "MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENCAPAI PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI SEKOLAH DASAR." *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 1, no. 1 (July 1, 2017). <https://doi.org/10.20961/jdc.v1i1.14410>.
- Siddiq, Triyandi Syamsuri. "STRATEGI PENERAPAN ADMINISTRASI KURIKULUM MERDEKA DI MTS MA SUKAWENING BANDUNG," n.d.
- Suwartini, Erni Agustina. "SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH, PROFESIONALISME GURU DAN MUTU PENDIDIKAN." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 14, no. 2 (November 23, 2017): 62–70. <https://doi.org/10.17509/jap.v24i2.8294>.
- Tunas, Koni Olive, and Richard Daniel Herdi Pangkey. "Kurikulum Merdeka: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dengan Kebebasan dan Fleksibilitas." *Journal on Education* 6, no. 4 (June 25, 2024): 22031–40. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6324>.
- Wawan, Ade. "PERANADMINISTRASIPENDIDIKANDALAMMEWUJUDKANSEKOLAH EFEKTIFDANEFISIEN" 04, no. 03 (2025).

